

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan peserta pemekaran pemerintah pusat di Indonesia melalui sistem desentralisasi atau otonomi daerah, merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang diberdayakan. Tugasnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah semakin dekat dengan rakyat, dan lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsive terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam

rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai otonomi. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional.

Sebagai hasil dari penyelenggaraan otonomi, setiap daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, otentik, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan pertimbangan bahwa seluruh potensi masyarakat terpenuhi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika suatu daerah dapat menciptakan realisasi value for money yang transparan, bertanggung jawab dan benar, maka daerah tersebut dapat maju dan berkembang. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, tujuan utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam mengelola dan membangun daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan agar laju pertumbuhan antardaerah dan laju pertumbuhan antara perkotaan dan perdesaan lebih seimbang dan harmonis, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional serta hasilnya lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, selaras, serasi, dan seimbang, serta dilaksanakan secara terarah, sehingga pembangunan setiap daerah sesuai

dengan prioritas dan potensi daerah. Keseluruhan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional untuk memantapkan terwujudnya Wawasan Nusantara. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila kemampuan, prakarsa, serta partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan terus didorong dan ditingkatkan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, rencana pembangunan daerah disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dokumen rencana pembangunan harus disiapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pemerintah Kota Makassar selalu berusaha untuk memaksimalkan pembangunan daerahnya. Terkhusus dalam memperbaiki atau mengganti aset yang rusak dengan yang lebih baik agar target anggaran dalam perencanaan pembangunan daerah bisa tercapai dan terlampaui, namun dalam praktek di lapangan masih saja didapati kendala dan permasalahan yang terjadi terkait dengan perencanaan dan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Makassar berkembang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar. Kota Makassar menempati urutan pertama dengan indeks pembangunan manusia sebesar 79,35% pada tahun 2014. Keberhasilan tersebut menjadikan Kota Makassar sebagai barometer kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan ibu kota

Provinsi Sulawesi Selatan, menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan di Makassar di mana sebagian besar instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan berada, selain itu juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, perekonomian, dan pelayanan, serta wisatawan mancanegara. Gerbang utama khususnya di Indonesia Timur ini memiliki banyak destinasi wisata yang sangat menarik

Di balik potensi dan kemajuan tersebut, pengembangan kawasan Makassar masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas, penambahan jumlah penduduk, dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, transportasi, penyediaan fasilitas publik, kerawanan sosial dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut di atas, pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan tenaga ahli di bidangnya.

Masyarakat umum, baik berbentuk perorangan, lembaga pemerintah, maupun swasta, pasti memerlukan wadah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Mereka sebagai pemilik maupun investor akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu, perlu ditetapkan dan dibangun sarana bangunan sesuai dengan fungsi yang dimaksudkan. Ada pemilik maupun investor yang telah mampu menentukan dan mendapatkan fungsi bangunan yang mereka butuhkan. Akan tetapi, banyak juga kalangan-kalangan yang memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain untuk mendapatkan yang mereka

inginkan. Salah satu dari pihak-pihak tersebut adalah arsitek, baik secara pribadi maupun yang tergabung dalam biro konsultan perencanaan pembangunan.

Arsitek sebagai salah satu tenaga ahli, mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Keterlibatan seorang arsitek dimulai dari tahap penyusunan program perencanaan, tahap konsep dan pengembangan konsep, tahap pengembangan desain, pelelangan maupun pada tahap pelaksanaan dan pengawasan konstruksi sampai pada tahap pemeliharaan, pengoperasian hingga pada evaluasi pascahuni. Selain dari itu, seorang arsitek juga harus memiliki pengetahuan manajemen suatu proyek dalam administrasi perusahaan dengan dibantu oleh tenaga ahli administrasi.

Oleh karena itu, arsitek tidak hanya perlu memiliki kemampuan desain, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola manajemen administrasi dan keuangan perusahaan, serta harus memiliki pengetahuan praktis yang diperoleh melalui pengalaman kerja untuk menunjang kegiatan desain agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar.

Di tengah kian pesatnya pembangunan di Indonesia yang memerlukan beberapa bentuk karya yang tercipta baik dari segi arsitektur, Tata Lingkungan maupun dari segi ketahanan konstruksinya, maka dengan ini selalu dibutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk dapat melahirkan karya-karya baru dan bermutu mengikuti laju pertumbuhan zaman yang makin pesat.

Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka akselerasi implementasi otonomi daerah, bukan saja diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dan

pihak swasta sebagai dalam satu sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kota Makassar merupakan salah satu Kota yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dan pihak swasta tentu memiliki pengalaman berbeda disesuaikan dengan keadaan tiap daerah yang mempunyai ciri khas tertentu. Dalam suatu kesempatan, Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan Kotanya. CV. Mazaya Altissimo sebagai salah satu pihak swasta yang ikut serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan berkontribusi secara langsung dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar.

Dengan tujuan yang mulia serta idealisme yang tinggi, tetap konsisten dengan komitmen awal pada saat mendirikan perusahaan di awal tahun 2019. Di mana tenaga-tenaga ahli potensial yang telah banyak menghasilkan karya-karya nyata dalam suatu pelaksanaan Pengawasan Proyek, baik proyek pemerintah maupun swasta, yang telah diselesaikan dan diterima dengan baik. Memasuki Era Pasar bebas, tuntutan akan pembangunan semakin membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil dan kompeten di bidangnya, dan untuk mengantisipasi hal ini CV. Mazaya Altissimo didukung oleh para profesional muda dengan pengalaman dan keahlian yang luas di bidangnya masing-masing dan metode kerja yang profesional. Mereka berusaha tampil bersama peserta pembangunan lainnya untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sendiri untuk membangun Kota Makassar menjadi lebih baik.

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa pembangunan daerah Kota Makassar yang sangat pesat masih dirasa belum optimal dan butuh upaya dan tenaga ahli dalam menyelesaikan tantangan yang ada. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam dengan tujuan untuk menganalisis Kontribusi pihak ke tiga dalam mendukung pembangunan Kota Makassar. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi CV. Mazaya Altissimo Dalam Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Di Kota Makassar”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kontribusi CV. Mazaya Altissimo Dalam Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Di Kota Makassar”. Untuk menjawab permasalahan di atas, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana Kontribusi CV. Mazaya Altissimo dalam membantu Pemerintah Kota Makassar mengatasi tantangan-tantangan dalam program pembangunan daerah di Kota Makassar?”.

C. Tujuan penelitian

Kata perencanaan digunakan dengan berbagai cara dan berbagai makna di berbagai bidang. Pada skala kawasan, perencanaan kota meliputi situasi dan perkembangan lingkungan suatu bangunan atau sekumpulan gedung, suatu taman, jalur pejalan kaki, atau elemen fisik lingkungan lain yang saling berhubungan dengan penghuninya. Sedangkan perencanaan kota menurut para ahli adalah sebagai berikut:

“Urban Design adalah suatu jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur. Perhatian utama Urban Design adalah pada bentuk fisik kota”. (Robert M. Beckley, 1979)

“Di dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna yang khusus, yang membedakannya dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perancangan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial” (Melville Branch, 1995)

Dalam buku Antoniades (1986), *Harry Anthony* menjelaskan pengertian perancangan kota sebagai berikut: *“perancangan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi baik, ekonomis untuk dibangun, dan memberi kenyamanan untuk dilihat dan untuk hidup di dalamnya”*.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka tujuan dan maksud penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Kontribusi CV. Mazaya Altissimo dalam Perencanaan Pembangunan Kota Makassar.
2. Menganalisis kemampuan CV. Mazaya Altissimo mengelola anggaran dalam Perencanaan Pembangunan Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi CV. Mazaya Altissimo dalam memperbaiki kinerja untuk membantu pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan dan perancangan Kota.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang mekanisme kerja CV. Mazaya Altissimo dalam membantu Perancangan dan Pembangunan Daerah di Kota Makassar; dan sebagai tambahan ilmu terutama bagi penulis mengenai pengetahuan tentang perancangan dan pembangunan daerah.